

ACTA CIVICUS

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan

DAFTAR ISI

Editorial.....	i
Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional Udin S. Winataputra.....	1 - 10
Pendidikan Demokrasi sebagai Konteks <i>Civic Education</i> di Negara Berkembang Dasim Budimansyah.....	11 - 26
Indonesia's Citizenship Education: Shifting Paradigm in Transition to Democracy Fredyy K. Kalidjernih.....	27 - 44
Perpaduan dalam Kurikulum Sivik dan Kewarganegaraan Amir Hasan Dawi, Mohmad Noor Mohmad Taib, Abu Bakar Yusuf.....	45 - 54
<i>Civic Education</i> Berbasis Pendidikan Moral di Cina Samsuri.....	55 - 66
Profil <i>Civic Education</i> di Pakistan Deny Setiawan.....	67 - 76
Pendidikan Kewarganegaraan di Jepang Dikdik Baehaqi Arif.....	77 - 84
Tinjauan Buku: Survei Awal Kepustakaan: PERBANDINGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI DUNIA: John J. Cogan, Paul Morris dan Murray Print (eds.), <i>Civic Education in the Asia-Pacific Region: Case Studies Across Six Societies</i> , (New York: Routledge Falmer, 201 pp) ISBN: 0-415-93213-0.	

CIVIC EDUCATION BERBASIS PENDIDIKAN MORAL DI CINA*

Oleh : Samsuri **

Abstract

This paper describes shortly the profile of civic education in the People Republic of China (PRC). Civic education (CE) in educational system of PRC has characteristics as moral education or political education or ideological education. CE explained as moral education as well as ideological-political education which implemented at all school levels. Development of CE in PRC, historically, has been influenced by political system at country, especially the Communist Party of China (CPC) since 1949. Entering the globalization era, CE within Moral Education subject gradually has changed toward citizenship education according to Kerr (1999) categorized.

Keywords : pendidikan moral, pendidikan kewarganegaraan, ideologi, situs kewarganegaraan, perbandingan.

Pendahuluan

Tidak ada sebutan khusus "pendidikan kewarganegaraan" (*civic education*) di Republik Rakyat Cina (RRC, selanjutnya disebut Cina). Pendidikan kewarganegaraan khas Cina terletak secara melekat (*inherent*) dalam bentuk pendidikan moral. Pendidikan moral ini selalu berkaitan erat dengan kehidupan politik di Cina. Dalam amatan Wing On Lee dan Chi Hang Ho (2005: 413) serta Limin Bai (1998: 525), istilah "pendidikan moral" (*daode jiaoyu*) disebut juga dengan istilah pendidikan

*Bagian besar naskah ini semula oleh penulis disajikan sebagai paper untuk kajian Perbandingan Civic Education di Negara Berkembang Semester Genap 2006/2007 di Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, kemudian dimuat dan dijadikan sebagai salah satu bagian materi Bab 3 dari buku Udin S. Winataputra dan Dasim Budimansyah, *Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*, (Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2007). Untuk keperluan jurnal ini, naskah disunting ulang seperlunya oleh penulis. Terimakasih disampaikan kepada penyunting ahli, terutama kepada Profesor Udin S. Winataputra dan Dr. Dasim Budimansyah, serta Gini Pratigina atas komentar-komentar terhadap draft naskah ini.

**Samsuri, lektor di Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) Universitas Negeri Yogyakarta. Bidang Keahliannya ialah Etika dan Pendidikan Moral, dengan minat utama kajian Pendidikan Kewarganegaraan. Alamat e-mail: <samsuri@uny.ac.id>

ideologi (*sixiang jiaoyu*) atau pendidikan politik (*zhengzhi jiaoyu*) atau pendidikan ideopolitik, sehingga kualitas moral bagai dua sisi mata uang yaitu sama kualitasnya dengan kualitas ideomoral dan atau moral-ideopolitik (*sixiang zhengzhi suzhi*). Tiga istilah tersebut digunakan secara bertukaran dalam literatur pendidikan di Cina.

Secara etimologis, pendidikan moral di Cina menjadi sesuatu yang esensial sebagai alat sosialisasi politik, dalam mentransmisikan nilai-nilai ideologi dan politik, tidak hanya kepada para siswa, tetapi juga untuk masyarakat luas (Lee dan Ho, 2005: 413). Dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Partai Komunis Cina (1988), *Notice on Reforming and Strengthening the Moral Education Work in Secondary and Primary Schools*, dinyatakan bahwa "moral education is ideological and political education. It plays an important role in upholding the socialist nature of the school" (sebagaimana dikutip Lee dan Ho, 2005: 414). Dari dokumen tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan moral merupakan pendidikan ideologi dan politik secara bersamaan. Dengan demikian, perubahan politik sekaligus mempengaruhi perkembangan pendidikan politik di Cina. Hal serupa juga berarti bahwa pendidikan moral mencerminkan perubahan politik (Lee dan Ho, 2005: 414).

Dalam tulisan ini, kajian pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) di Cina akan memfokuskan diri kepada konteks pendidikan moral sebagai bentuk lain *civic education* di Cina. Selanjutnya, pembahasan akan mencakup kajian tentang landasan pengembangan pendidikan moral sebagai *civic education*, kurikulum dan bahan ajar pendidikan moral sebagai *civic education*, dan kultur kelas pendidikan moral sebagai *civic education* dan situs kewarganegaraan di Cina.

Konteks Pendidikan Moral sebagai *Civic Education* Model Cina

Penjelasan Wing On Lee (2006:5) tentang karakteristik pendidikan kewarganegaraan di negara-negara Asia dapat membantu pemahaman kita terhadap keberadaan pendidikan moral yang menjadi aspek pokok kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Cina. Sebagaimana dinyatakan oleh Kennedy dan Fairbothor (2004), (dalam Lee, 2006: 5) bahwa pendidikan kewarganegaraan Asia ditandai oleh konsepsi-konsepsi keutamaan moral dan nilai-nilai personal.

Dalam kasus Cina, sebagaimana telah dipaparkan di muka, pendidikan kewarganegaraan merupakan kombinasi dari "civic education, moral education, political education and ideological education" (Lee, 2006: 5). Meskipun istilah-istilah itu dapat dibedakan, namun secara konseptual sering saling dipertukarkan dalam

penerapannya. Lee dan Zhong (dalam Lee, 2006 : 5) telah mengidentifikasi suatu kontinum antara orientasi secara politik *civic education* dan orientasi secara politik pendidikan moral dalam perkembangan kurikulum kewarganegaraan di Cina lebih dari 50 tahun yang lampau. Pendidikan kewarganegaraan di Cina setara (ekuivalen) dengan pendidikan ideologis dan politik pada tahun-tahun awal Pemerintahan Komunis Cina. Fokus pendidikan kewarganegaraan meningkatkan orientasinya kepada kualitas moral personal pada saat sekarang, meskipun elemen-elemen politik selalu hadir dalam sejarah pendidikan kewarganegaraan Cina. Dengan demikian, hubungan antara pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan moral adalah suatu kontinum di Cina, di mana pada periode awal lebih pada pendidikan kewarganegaraan tetapi pada saat sekarang lebih kepada pendidikan moral, dan tidak ada waktu tanpa satu dengan lainnya (Lee, 2006: 5).

Dalam sistem pendidikan nasional Cina ada konsep *deyu*, yang artinya sama dengan pendidikan moral. Meskipun demikian, *deyu* memiliki pengertian lebih luas tidak hanya untuk pendidikan moral, tetapi juga pendidikan ideologis dan politik, termasuk pelajaran hukum, kesehatan (fisik dan mental), pelajaran yang berkaitan dengan bekerja dan banyak kegiatan lainnya untuk pendidikan umum siswa. Arti ini lebih luas dikenal sebagai "makro-*deyu*". Mikro-*deyu* berarti hanya pendidikan moral; sedangkan yang lainnya termasuk makro-*deyu* (Li Ping, Zhong Minghua, Lin Bin dan Zhang Hongjuan, 2004: 449-450).

Pendidikan kewarganegaraan dalam bentuk pendidikan moral di Cina secara ringkas dapat dilihat kontinum perkembangannya sejak 1949 hingga sejak 1993. Pada periode 1949-1978, pendidikan moral berorientasi politik, yang dalam pelaksanaannya mendasarkan diri kepada *Common Framework for Chinese People's Political Negotiations* dari Partai Komunis Cina. Tugas utama pendidikan moral ketika itu ialah untuk menghancurkan ideologi-ideologi para feodalis, borjuis dan fasis, serta menanamkan keutamaan-keutamaan nasional seperti mencintai tanah air, mencintai rakyat, mencintai buruh, mencintai ilmu, dan mencintai kekayaan publik (CCP 1949 dalam Lee dan Ho, 2005: 419).

Pada periode 1978-1993, secara gradual pendidikan moral menjadi independen dari politik. Pada Pleno Ketiga dari Kongres Nasional Kesebelas (1979), dilahirkan sebuah dokumen "Behavioral Code for Primary and Secondary Students" (PRCMOE, 1979). Dari dokumen itu, tugas pendidikan moral adalah menanamkan cita-cita, kualitas moral, budaya dan disiplin siswa; afektivitas terhadap tanah air sosialis dan kewirausahaan sosialis; dedikasi terhadap pembangunan negara; haus ilmu pengetahuan baru; dan kemauan untuk berpikir dan

penerapannya. Lee dan Zhong (dalam Lee, 2006 : 5) telah mengidentifikasi suatu kontinum antara orientasi secara politik *civic education* dan orientasi secara politik pendidikan moral dalam perkembangan kurikulum kewarganegaraan di Cina lebih dari 50 tahun yang lampau. Pendidikan kewarganegaraan di Cina setara (ekuivalen) dengan pendidikan ideologis dan politik pada tahun-tahun awal Pemerintahan Komunis Cina. Fokus pendidikan kewarganegaraan meningkat orientasinya kepada kualitas moral personal pada saat sekarang, meskipun elemen-elemen politik selalu hadir dalam sejarah pendidikan kewarganegaraan Cina. Dengan demikian, hubungan antara pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan moral adalah suatu kontinum di Cina, di mana pada periode awal lebih pada pendidikan kewarganegaraan tetapi pada saat sekarang lebih kepada pendidikan moral, dan tidak ada waktu tanpa satu dengan lainnya (Lee, 2006: 5).

Dalam sistem pendidikan nasional Cina ada konsep *deyu*, yang artinya sama dengan pendidikan moral. Meskipun demikian, *deyu* memiliki pengertian lebih luas tidak hanya untuk pendidikan moral, tetapi juga pendidikan ideologis dan politik, termasuk pelajaran hukum, kesehatan (fisik dan mental), pelajaran yang berkaitan dengan bekerja dan banyak kegiatan lainnya untuk pendidikan umum siswa. Arti ini lebih luas dikenal sebagai "makro-*deyu*". Mikro-*deyu* berarti hanya pendidikan moral; sedangkan yang lainnya termasuk makro-*deyu* (Li Ping, Zhong Minghua, Lin Bin dan Zhang Hongjuan, 2004: 449-450).

Pendidikan kewarganegaraan dalam bentuk pendidikan moral di Cina secara ringkas dapat dilihat kontinum perkembangannya sejak 1949 hingga sejak 1993. Pada periode 1949-1978, pendidikan moral berorientasi politik, yang dalam pelaksanaannya mendasarkan diri kepada *Common Framework for Chinese People's Political Negotiations* dari Partai Komunis Cina. Tugas utama pendidikan moral ketika itu ialah untuk menghancurkan ideologi-ideologi para feodalis, borjuis dan fasis, serta menanamkan keutamaan-keutamaan nasional seperti mencintai tanah air, mencintai rakyat, mencintai buruh, mencintai ilmu, dan mencintai kekayaan publik (CCP 1949 dalam Lee dan Ho, 2005: 419).

Pada periode 1978-1993, secara gradual pendidikan moral menjadi independen dari politik. Pada Pleno Ketiga dari Kongres Nasional Kesebelas (1979), dilahirkan sebuah dokumen "Behavioral Code for Primary and Secondary Students" (PRCMOE, 1979). Dari dokumen itu, tugas pendidikan moral adalah menanamkan cita-cita, kualitas moral, budaya dan disiplin siswa; afektivitas terhadap tanah air sosialis dan kewirausahaan sosialis; dedikasi terhadap pembangunan negara; haus ilmu pengetahuan baru; dan kemauan untuk berpikir dan

keberanian untuk kreatif. Pada 1988, terdapat sebuah revisi radikal dalam kurikulum pendidikan politik. Di tingkat sekolah menengah pertama, mata pelajaran 'Civics' (Ilmu Kewarganegaraan) diperkenalkan di kelas 1 SMP (usia 12), 'sejarah sosial' (social history) di kelas 2 SMP (usia 13), dan 'Konstruksi Sosialisme Cina' (construction of Chinese socialism) di kelas 3 SMP (usia 14). Di tingkat sekolah menengah atas dikenalkan 'Pandangan Ilmiah Kehidupan' (scientific view of life) untuk kelas 1 SMA (usia 15), 'Ekonomi' (economics untuk kelas 2 SMA (usia 16), dan 'Politik' (politics) di kelas 3 SMA. Pada 1988 pun dilahirkan satu dokumen lainnya, yaitu *Outline of Moral Education Secondary School* yang diterapkan secara penuh pada 1991. Arti penting dokumen ini ialah bahwa pendidikan moral tidak lagi diembel-embeli dengan kata 'ideologi'. Pendidikan moral mulai memfokuskan diri kepada kurikulum kewarganegaraan semata. Dokumen *Outline* itu mewajibkan pengajaran materi dan pendekatannya kepada aspek-aspek nilai, sikap dan perilaku (Lee dan Ho, 2005: 419-420). Fokus utama *Outline* mencakup kajian: Sosialisme dan kolektivisme berdasarkan atas patriotisme; Standar moral dan perilaku siswa; dan Adopsi sebuah pendekatan motivasional untuk mengembangkan kepercayaan diri (*self-esteem*), kemandirian (*self-reliance*), dan kekuatan diri siswa (Lee dan Ho, 2005: 420).

Pada 1993 dan 1994 Pemerintah Cina mengeluarkan dua dokumen penting yang merubah arah pendidikan moral. Dua dokumen itu ialah *Opinions on Strengthening and Improving the Party and Ideopolitical Works in Higher Institutes in New Circumstances* dan *Opinions on Further Strengthening and Improving Moral Education Work in Schools* (Lee dan Ho, 2005: 420). Dokumen itu meluncurkan gagasan pendidikan "dua pelajaran", yang berarti bahwa pendidikan politik didefinisikan sebagai satu kombinasi pelajaran teori Marxis dan pelajaran pendidikan ideopolitik. Perbedaan dua pelajaran itu di dalam pendidikan moral itu mengatur pemeliharaan pentingnya Marxisme dalam kurikulum sekolah, namun pada saat yang sama mencakup status resmi untuk pendidikan ideopolitik. Istilah 'pendidikan ideopolitik' lebih kepada 'penanaman kualitas ideomoral'. (Lee dan Ho, 2005: 420-421).

Pada periode sejak 1993 terjadi depolitisasi pendidikan moral, yakni ditandai dengan penerimaan kebijakan 'dua pelajaran' sebagai demarkasi untuk pendidikan moral. Ini merupakan tanda pengakuan status independen dari pendidikan moral oleh Pemerintah Cina. Sejak meluncurkan modernisasi, maka pengajaran moralitas kewarganegaraan berorientasi kepada ekonomi pasar (Lee dan Ho, 2005: 421). Hasil yang dicapai dari periode ini ialah bahwa modernisasi dan keterbukaan Cina terhadap ekonomi pasar (kapitalisme global) menjadikan kurikulum

pendidikan moral perlu mengembangkan diri sebagai pembebasan kurikulum kewarganegaraan yang berfokus kepada pertumbuhan individu dari sosialisasi politik (Lee dan Ho, 2005: 421).

Landasan Pengembangan Pendidikan Moral sebagai *Civic Education* Model Cina

Pengembangan pendidikan moral sebagai bentuk khas *civic education* di Cina, didasarkan kepada sejumlah dokumen-dokumen Partai Komunis Cina (PKC) dan dan Pemerintah Cina itu sendiri. Antara PKC dan Pemerintah Cina itu sendiri adalah dua sisi sebuah mata uang. PKC dengan Polit Biro-nya merupakan lembaga yang menentukan jalannya pemerintahan di Cina. Dengan demikian pendidikan moral yang dilaksanakan di Cina merupakan produk kebijakan lembaga tersebut, yang tentu saja nilai-nilai moral dasarnya mendasarkan diri pada asas dan cita-cita partai yang mendasarkan diri pada Marxisme-Leninisme, ajaran Ketua Mao Zedong, Pikiran Deng Xiaoping dan nasionalisme Cina itu sendiri (Li Ping, Zhong Minghua, Lin Bin dan Zhang Hongjuan, 2004: 459).

Reformasi pendidikan moral oleh PKC dan Pemerintah Cina pada periode sejak 1993 antara lain *Proposals for reinforcing and improving primary and secondary school Deyu* (CPC & State Council (CPC&SC), 2000); *Program for improving civic morality* (CPC, 2001); *Proposals for improving the ethical, ideological and moral standards of children and young people across the country* (CPC&SC, 2004), *Implementation outlines to carry forward and cultivate the national spirit in primary and secondary schools* (CPC&PRC Ministry of Education (MOE), 2004); dan *Rules for primary and secondary students* (PRCMOE, 2004) (dalam Qi Wanxue and Tang Hanwei, 2004: 465-480). Dokumen-dokumen itulah yang sekarang menjadi dasar pengembangan dan pelaksanaan pendidikan moral di Cina.

Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Moral sebagai *Civic Education* Model Cina

Pendidikan nasional Cina memiliki tujuan yang sangat kompleks. Ini merupakan konsekuensi logis sebagai salah satu negara besar dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Tujuan-tujuan pendidikan nasional tersebut dimaksudkan sebagai berikut:

- untuk memahami perubahan-perubahan lokal yang membuat perubahan besar di Cina dengan kebijakan pembaharuan dan keterbukaan serta ekonomi pasar sosialis yang dipimpin oleh PKC dan

- untuk memahami bahwa Marxisme-Leninisme, Pikiran Mao Zedong, Teori Deng Xiaoping dan 'pikiran penting Tiga Tokoh' adalah panduan ideologi dalam membangun sosialisme dengan karakteristik Cina;
- untuk memahami garis dasar Partai pada tahap primer sosialisme, basis ekonomi dan sistem politik negara pada tahap sekarang, dan keunggulan (superioritas) sistem sosialis dalam menghasilkan kekayaan sosial dan keuntungan rakyat;
- untuk memahami tujuan-tujuan pembangunan masyarakat yang kurang baik dengan semua cara dan pembangunan sosial yang tidak seimbang untuk memperkokoh misi pembangunan sosialis Cina;
- untuk memahami prestasi-prestasi negara di bidang sains, teknologi dan perkembangan pendidikan, untuk mengetahui tentang kesenjangan antara Cina dan negara-negara maju, untuk memahami makna sesungguhnya dari pengejawantahan strategi yang mendukung kemajuan negara dengan sains dan teknologi;
- untuk mengetahui kondisi kependudukan, sumber daya dan lingkungan, untuk memahami kebijakan keluarga berencana, perlindungan lingkungan, pemanfaatan secara rasional atas sumber daya, dan untuk membentuk pembangunan berkelanjutan yang abadi;
- untuk memahami bahwa pembangunan sebuah negara persatuan multi-etnik tergantung kepada semua solidaritas rakyat, kerjasama, kerja keras dan pembangunan bersama, serta untuk belajar tentang tradisi asli bangsa Cina dan membawa ke depan dan menanamkan semangat (spirit) yang menjadi tekad setiap orang, sebagaimana untuk mendukung peradaban spiritual sosialis serta keteguhan menjaga solidaritas nasional dan etnik;
- untuk memahami kecenderungan perkembangan dunia kontemporer, untuk mengetahui status dan fungsi Cina di dunia, untuk mengetahui peluang-peluang dan tantangan yang dihadapi Cina, untuk belajar kecakapan bertahan, untuk membentuk konsep-konsep global, untuk memelihara perdamaian dunia;
- untuk memahami cita-cita umum bagi semua bangsa Cina dan berusaha untuk bekerja keras dalam karir pekerjaan seseorang serta membuat suatu sumbangan (kontribusi) terhadap masyarakat (sebagaimana disadur dari Zhan Wansheng dan Ning Wujie, 2004: 523).

Sementara itu, derivasi tujuan pendidikan nasional Cina dalam kurikulum pendidikan moral adalah bertujuan untuk:

- *enhance their moral dispositions;*
- *help them form healthy psychological traits;*
- *initiate their legal awareness;*

- *strengthen their sense of social responsibility and behaviour;*
- *assist them in the pursuit of higher ideological and ethical standards, over and above observing the basic code of conduct;*
- *and guide them in carrying forward the national spirit and fostering a common ideal for socialism with Chinese characteristics* (dalam Zhan Wansheng dan Ning Wujie, 2004: 519)

Secara historis, keberadaan pendidikan kewarganegaraan dalam bentuk pendidikan moral di sekolah-sekolah Cina dapat ditelusuri pada saat pendirian Republik Rakyat Cina 1949. Kecenderungan-kecenderungan kurikulum lebih mengacu pada sejarah untuk reformasi kurikulum sekarang. Materi kurikulum pendidikan moral di sekolah tidak lengkap, terlalu abstrak dan terlepas dari kehidupan sosial, serta bentuk pedagoginya menekan inisiatif, kreativitas dan kompetensi siswa, serta bentuk evaluasi (penilaiannya) menekankan kepada aspek kognitif terhadap apa yang diajarkan sebagai mata pelajaran akademik (*academic subject*). Menanggapi kenyataan kelemahan pendidikan moral semacam itu, maka dilakukan reformasi pendidikan yang berorientasi mutu di Cina dalam pendidikan moral. Pada 1992 dibentuk kurikulum Ideologi dan Politik yang diterapkan di sekolah menengah pertama hingga 2003, dengan dua revisi utama selama waktu itu untuk mengakomodasi intensifikasi proses pembaharuan dan keterbukaan (*'reform and opening up' process*), perubahan-perubahan di masyarakat dan perbaikan-perbaikan di tingkat-tingkat kognitif siswa (Zhan Wansheng dan Ning Wujie, 2004: 512). Tujuan reformasi kurikulum tersebut adalah untuk pengembangan orientasi perasaan, sikap dan nilai; pengembangan kompetensi moral; dan, pengembangan pengetahuan moral (Zhan Wansheng dan Ning Wujie, 2004: 519-20).

Perkembangan reformasi kurikulum pendidikan moral di Cina antara lain dapat dicontohkan dalam tingkat sekolah menengah pertama antara 1977-1992 pada Tabel 1. Pada bagian lain, di Tabel 2, dapat dicermati bagaimana hubungan antara tahap-tahap perkembangan sosial dan tujuan serta isi materi mata pelajaran Ideologi dan Moralitas di sekolah menengah pertama.

Hasil dari reformasi kurikulum pendidikan moral salah satunya adalah dikembangkannya buku-buku teks pendidikan moral mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat *College*. Kumpulan buku teks itu, atau biasa dikenal sebagai *The Experimental Moral Education Textbooks Series*, menjadi proyek nasional yang penting dari *Educational Scientific Tenth Five-year Plan*, yang dinamai dengan *Experiment-Based Research on Constructing a Whole Moral Education System to Popularize Systematic Achievements of*

Tabel 1. Kurikulum Pendidikan Moral di Sekolah Menengah Pertama Cina 1977-1992

	Grade One Age 12-13	Grade Two Age 13-14	Grade Three Age 14-15
1977-79	Brief History of Social Development	Scientific Socialism	
1980-85	Youth and Adolescent Development	Brief History of Social Development	Legal Knowledge
1986-92	Citizenship Brief History of Social	Development Knowledge of Building	Socialism in China
1992	Ideology and Politics for Junior High School (Mental Health)	Ideology and Politics for Junior High School (Legal Knowledge)	Ideology and Politics for Junior High School (Brief History of Social Development and National Conditions)

Sumber: Zhan Wansheng dan Ning Wujie, 2004:513

Tabel 2. Hubungan antara tahap-tahap perkembangan sosial dan tujuan serta isi materi mata pelajaran Ideologi dan Moralitas di sekolah menengah pertama

	Mental Health	Morality	Law	National Conditions
Growing Self	Knowing	Self-esteem and Self-encouragement	Legal Learning and Application	Cultural Identity/ Commitment to Chinese Culture
Relations between Self and Others	Communication and Understanding	Morality in Communication	Rights and Obligations	Common Ideals
Relations between Self, Collective, State and Society	Positive Attitudes towards Social Development and Progress	Responsibility to the Motherland, Society and Natural Environment	Law and Social Order	Understand National Conditions and Love China

PRCMOE, 2003 (dalam Zhan Wansheng dan Ning Wujie, 2004: 519)

Research and Experiment. Buku-buku teks itu dikembangkan oleh sebuah tim *Moral Education Textbooks for College's* yang diketuai oleh Zhan Wansheng, yang kemudian *Director of the Moral Education Centre* (sekarang *Director of the Research Department for School Education*) dari *China National*

Institute for Educational Research (CNIER). The Experimental Moral Education Textbooks Series terdiri atas 22 buku teks untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan atas, sekolah kejuruan pertama dan *colleges*. Masing-masing-masing buku teks itu ialah untuk: Sekolah Dasar (Tingkat Satu hingga Enam); Sekolah Menengah Pertama (tingkat tujuh hingga sembilan); Sekolah Menengah Umum Atas (tingkat sepuluh hingga duabelas); Sekolah Kejuruan Menengah (tingkat satu hingga tiga); Sekolah Normal Menengah untuk Pendidikan Guru (*Teacher's College*) (tingkat satu hingga tiga) (An Yunfeng, 2004: 626).

Buku-buku teks ini bertujuan untuk mendukung reformasi kurikulum pendidikan moral sebagai penerapan praktek pendidikan moral yang baru di semua jenis sekolah. Buku-buku teks mewakili eksplorasi rintisan untuk pembaharuan (reformasi) kurikulum Ideologi dan Moralitas dan memberikan materi-materi pokok dan dasar untuk pembentukan panduan-panduan kurikulum *Ideology and Moralitas*. Panduan-panduan kurikulum yang baru itu telah dibentuk oleh Menteri Pendidikan, untuk *Moral Character and Life* (PRCMOE, 2002a) dan untuk *Moral Character and Society* (PRCMOE, 2002b) di sekolah dasar, dan untuk *Ideology and Morality* (PRCMOE, 2003) di sekolah menengah pertama, yang memuat beberapa tujuan, materi, dan metode pendidikan moral sama sebagai garis besar bahan-bahan pengajaran (An Yunfeng, 2004: 626).

The Experimental Moral Education Textbook Series didasarkan kepada sebuah elaborasi desain dan penyusunan menurut teori pendidikan moral dan materi yang berkaitan dengan praktek dan penerapannya (implementasi). Menurut An Yunfeng (2004: 625-629), buku-buku teks itu memiliki ciri sebagai berikut: yang menggabungkan kesadaran, perasaan, kemauan dan perilaku; pendekatan 'back to life' dengan menggabungkan teori dan praktik; memperkenalkan metode kajian berorientasi penelitian untuk para siswa.

Kultur Kelas *Civic Education* dan Situs Kewarganegaraan di Cina

Dari paparan sebelumnya dapat diperoleh gambaran bagaimana sebenarnya *civic education* di Cina, yang tidak lain merupakan bentuk lain pengejawantahan pendidikan moral. Dengan demikian, jelas terbayang bagaimana karakteristik *civic education* di Cina yang sarat dengan visi ideologi politik Partai Komunis Cina, yakni Marxisme-Leninisme, Ajaran Mao Zedong dan teori Deng Xiaoping.

Menurut Zhu Xiaoman dan Liu Cilin (2004) secara umum ada dua pendekatan pengajaran moral di sekolah-sekolah Cina. Pertama, pendekatan pengajaran dengan berbasis mata pelajaran (*Subject-based*

moral education). Pendekatan ini menjadi mata pelajaran Pendidikan Moral tersendiri, di mana guru-guru khusus mengajar tentang ideologi, politik, hukum, moralitas dan kesehatan mental, sebagaimana kurikulum mata pelajaran lainnya (seperti Bahasa Cina, Bahasa Inggris, Matematika, Sejarah dan seterusnya).

Kedua, pendekatan pengajaran melalui kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler (*Extra-curricular activities*). Kegiatan ekstra-kurikuler ini dilakukan dalam bentuk seperti *morning meeting*, *class meeting*, atau kegiatan-kegiatan Partai, *Youth League* (Liga Pemuda, semacam KNPI di Indonesia) dan *Young Pioneers* (Pemuda Pelopor). Kegiatan ekstrakurikuler ini direncanakan, dirancang, dikoordinasikan dan diawasi oleh organisasi-organisasi di bawah Partai Komunis Cina, *Youth League* (Liga Pemuda) dan *Young Pioneers* (Pemuda Pelopor) sama seperti, *as well as the Office of Moral Education* dan guru-guru kelas (Xiaoman dan Cilin, 2004 481-494).

Dapat dimengerti, baik dalam pendekatan pertama maupun pendekatan kedua, model pendidikan yang dikembangkan bersifat indoktrinatif dan sarat ideologi partai penguasa. Sikap-sikap kritis sangat tertutup untuk dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan di bawah sistem politik otoriter. Namun, dari kedua pendekatan itu, ada situs-situs kewarganegaraan yang dapat menjadi media warga negara untuk mengaktualisasikan dirinya yakni melalui Partai dan organisasi kepemudaan partai. Organisasi-organisasi ini nampak berperan penting dalam membangun kultur politik dari model pendidikan moral yang memuat aspek-aspek *citizenship education*. Dari pengalaman pengamatan di Indonesia, partai dan organisasi kepemudaan memiliki bentuk-bentuk perkaderan (*training* atau sejenisnya) yang khas untuk selain membangun kelangsungan hidup lembaga, juga melakukan rekrutmen dan regenerasi.

Penutup

Kategorisasi David Kerr (1999) tentang pendidikan kewarganegaraan antara kontinum minimal dan maksimal, mendapati keunikan untuk menjelaskan profil pendidikan kewarganegaraan di Cina. Di satu sisi, pendidikan kewarganegaraan berada pada posisi minimal, seperti menekankan kepada konten dan transmisi didaktik. Di sisi lainnya, pendidikan kewarganegaraan sarat nilai, dan diajarkan tidak hanya di lembaga pendidikan formal, tetapi juga di luar sekolah sebagai satu bentuk kaderisasi yang dilakukan partai (PKC). Sungguh pun demikian, perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Cina secara umum berubah secara gradual ke arah garis maksimal Kerr.

Dari gambaran umum tentang pendidikan kewarganegaraan di Cina, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di tiap-tiap negara memiliki berbagai penamaan yang berbeda-beda dan aspek penekanan yang berbeda pula, sebagai suatu ciri dan karakteristik yang dipengaruhi oleh sistem nilai dan budaya politik (sistem politik) yang dianut oleh suatu negara. Dalam kasus Cina, pendidikan moral yang memuat ideologi politik partai penguasa menjadi mata pelajaran penting untuk implementasi *civic education* terutama di sekolah.

Aspek politik sangat dominan mempengaruhi model *civic education* di Cina. Hal ini merupakan sebuah keniscayaan dari sistem politik otoriter Cina di bawah pemerintahan Partai Komunis Cina yang mengedepankan kepatuhan warga negaranya untuk mengukung cita-cita partai tersebut, semenjak 1949 berkuasa hingga sekarang. Hal menarik ialah bahwa meskipun *civic education* sebagai pengejawantahan dari pendidikan moral yang diajarkan secara formal di sekolah, namun partai dan organisasi kepemudaannya telah berhasil membangun situs-situs kewarganegaraan yang masif.

Sekilas, keberadaan *civic education* di persekolahan di Cina hampir memiliki persamaan-persamaan dengan kondisi yang ada di Indonesia, terutama pada masa Orde Baru (Samsuri, 2004; Kalidjernih, 2005, Bourchier, 2007: 339-367 dan 380-381). Jika di masa Orde Baru, *civic education* identik dengan pendidikan moral yang dijabarkan dari tafsir rejim atas Pancasila sebagai ideologi negara, maka di Cina selain menanamkan *status quo* pemerintah juga menanamkan ideologi Marxisme-Leninisme, Ajaran Mao Zedong dan Teori Deng Xiaoping. Sekalipun ada beberapa bagian yang tidak dapat dibandingkan antara konteks Indonesia era Orde Baru dan Cina (seperti sejarah politik, dan budaya politik yang dibangun), namun rejimentasi politik yang dominan dalam bentuk tafsir tunggal rejim terhadap ideologi negara ke dalam pendidikan kewarganegaraan hampir memiliki kemiripan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bai, L. (1998). "Monetary Reward Versus the National Ideological Agenda: Career Choice among Chinese University Students". *Journal of Moral Education*, Vol. 27 No. 4, pp. 525-540.
- Bourchier, D. (2007). *Pancasila Versi Orde Baru dan Asal Muasal Negara Organik (Integralistik)*, terj. Agus Wahyudi dari bahasa Inggris *Lineages of Organicist Political Thought in Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media Yogyakarta dan Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada.

- Kalidjernih, F.K. (2005). *Post-Colonial Citizenship Education: A Critical Study of the Production and Reproduction of the Indonesian Civic Ideal*. Disertasi Ph.D, University of Tasmania, Australia. Tidak diterbitkan.
- Kerr, D. (1999). *Citizenship Education: An International Comparison*. London: Quality Curriculum Association.
- Lee, W.O. dan Chi Hang Ho (2005). "Ideopolitical Shifts and Changes in Moral Education Policy in China". *Journal of Moral Education*, Vol. 34, No.4, December, pp. 413-431.
- Lee, W. O. (2006). "Tension and Contentions in the Development of Citizenship Curriculum in Asian Countries" *Keynote Address at the CITZED International Conference, Oriel College, Oxford, 25-27 July*, 16 pages.
- Ping, L, Zhong Minghua, Lin Bin dan Zhang Hongjuan. (2004). "Deyu as Moral Education in Modern China: Ideological Functions and Transformations". *Journal of Moral Education*, Vol. 33, No. 4, December, pp. 449-460.
- Samsuri. (2004). "Civic Virtue dalam Pendidikan Moral dan Kewarganegaraan di Indonesia Era Orde Baru". *Jurnal Civics*, Vol. 1, No. 2, Desember.
- Wansheng, Z. dan Ning Wujie. (2004). "The Moral Education Curriculum for Junior High Schools in 21st Century China". *Journal of Moral Education*, Vol. 33, No. 4, December, pp. 511-532.
- Wanxue, Q. and Tang Hanwei. (2004). "The Social and Cultural Background of Contemporary Moral Education in China". *Journal of Moral Education*, Vol. 33, No. 4, December, pp. 465-480.
- Xiaoman, Z. dan Liu Cilin. (2004). "Teacher Training for Moral Education in China". *Journal of Moral Education*, Vol. 33, No. 4, December 2004, pp. 481-494.
- Yunfeng, A. (2004) "Curriculum Materials Reviews". *Journal of Moral Education*, Vol. 33, No. 4, December 2004: 625-629.

Acta Civicus

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan

Volume 1, Nomor 1, Oktober 2007

ISSN : 1978-8428

Civic Education
dalam Perspektif
Internasional

